

**PENYELESAIAN SENGKETA KARYA JURNALISTIK TERHADAP DELIK
PENGHINAAN DALAM KERANGKA MENJAMIN KEMERDEKAAN PERS**

TESIS

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Magister Hukum*



Oleh:

**AULIA RIZAL
1820112048**

Komisi Pembimbing:

- 1. Dr. SYOFIRMAN SYOFYAN, S.H., M.H**
- 2. Dr. KHAIRUL FAHMI**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

PENYELESAIAN SENGKETA KARYA JURNALISTIK TERHADAP DELIK PENGHINAAN DALAM KERANGKA MENJAMIN KEMERDEKAAN PERS

Aulia Rizal, NIM: 1820112048, Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022, 152 Halaman

ABSTRAK

Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional diberikan hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) UU Pers dan wartawan dalam melaksanakan profesi mereka mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sebagaimana dijamin Pasal 8 UU Pers. Karya jurnalistik sebagai hasil kegiatan jurnalistik yang dihasilkan oleh pers dalam rangka menjalankan peran dan fungsi pers sebagaimana diamanatkan UU Pers nyatanya dihadapkan dengan keberadaan norma-norma penghinaan yang terdapat di dalam ketentuan KUHP dan UU ITE yang kenyataannya telah banyak mengancam bahkan mempidakan wartawan, sementara itu UU Pers yang mengatur perihal penyelesaian sengketa karya jurnalistik seringkali tidak mampu melindungi wartawan dari jeratan delik penghinaan, sehingga memunculkan dua permasalahan. *Pertama*, bagaimana persinggungan antara delik penghinaan dengan kemerdekaan pers dalam kaitannya dengan karya jurnalistik? *Kedua*, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa karya jurnalistik yang diancam delik penghinaan dalam kerangka menjamin kemerdekaan pers? Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dari penelitian ini didapati bahwa delik penghinaan tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan pers dan dapat membatasi jaminan kemerdekaan pers dalam kaitannya dengan karya jurnalistik sebagai hasil kegiatan jurnalistik dalam rangka menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers sebagaimana dijamin di dalam UU Pers. Sedangkan penyelesaian sengketa karya jurnalistik tidak diatur secara sistematis mekanismenya serta tidak terdapat ketentuan yang mengatur dengan tegas prosedur mana yang wajib ditempuh terlebih dahulu untuk menyelesaikan setiap sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik, sehingga kondisi ini membuka ruang kepada orang, sekelompok orang, atau pihak-pihak yang merasa dihina, dirugikan, dan/atau merasa dicemarkan nama baiknya untuk menempuh prosedur di luar UU Pers.

**Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Karya Jurnalistik, Delik Penghinaan
Kemerdekaan Pers**

SETTLEMENT OF DISPUTES ON JOURNALISTIC WORKS AGAINST OFFENSES OF INSULT IN THE FRAMEWORK OF GUARANTEEING PRESS FREEDOM

Aulia Rizal, NIM: 1820112048, Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022, 152 Halaman

ABSTRACT

Guaranteeing freedom of the press, the national press was given the right to seek, obtain and disseminate ideas and information as stipulated in Article 4 paragraph (2) of the Press Law and journalists carrying out their profession receive legal protection in carrying out their functions, rights, obligations and roles as guaranteed in Article 8 of the Press Law as a result of journalistic activities produced by the press to carry out the roles and functions of the press as mandated by the Press Law are faced with the existence of insulting norms contained in the provisions of the Criminal Code and the ITE Law which have threatened and even criminalized journalists, meanwhile The Press Law which regulates the settlement of journalistic work disputes is often unable to protect journalists from the snares of insulting offences, giving rise to two problems. First, how is the intersection between the offence of insult and freedom of the press with journalistic work? Second, what is the mechanism for resolving journalistic work disputes that are threatened with insults within the framework of guaranteeing press freedom? This study uses normative legal research methods, with library data collection techniques. From this study, it was found that the offence of insult is not in line with the spirit of the freedom press and can limit the guarantee of the press` freedom concerning journalistic works as a result of journalistic activities in the context of carrying out the functions, rights, obligations and roles of the press as guaranteed in the Press Law. Meanwhile, the mechanisms for resolving journalistic work disputes are not systematically regulated, and there are no provisions that explicitly regulate which procedures must be taken first to resolve any disputes related to journalistic works so that this condition opens up space for people, groups of people, or parties who feel insulted, harmed, and/or feel defamed to take procedures outside the Press Law.

Keywords: Dispute Resolution, Journalistic Work, Offense of Insulting Press Freedom